

**ABSTRAK****PENANAMAN MODAL  
DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH****Disusun Oleh :  
Kristiannico, S.H**

Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat membangkitkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangannya dalam penyelenggaraan penanaman modal serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanaman modal oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan di bidang penanaman modal yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kini telah dibatasi dimana pemerintah berperan mengendalikan dan mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kepastian hukum dan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, hemat, dan efisien bagi para pelaku usaha.

Kata Kunci :

Penanaman Modal, Otonomi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Penanaman Modal